ISSN : 2086-6011

ekonomika

JURNAL EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Menyemai Ilmu, Membangun Peradaban, dan Menjadi Kemakmuran

M. Syahirman Yusi :
Revitalisasi Kebijakan: Upaya Peningkatan Kinerja Koperasi Indonesia di Era Pasar Bebas

Amiruddin Idris :
Pengaruh Motivasi Kerja dan Jiwa Kewirausahaan terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur SKPD dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh

Sonny M. Ikhsan M. :
Pengaruh Keamanan, Kesadaran Masyarakat, Pungutan Liar, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam terhadap PAD Bireuen

Umiyati Idris, Sriati, M.Yamin, dan Taufik Marwa :
Konsep Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

M. Yusuf A. Samad :
Pengaruh Imbalan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Sekretariat DPR Kota Lhokseumawe

Ismed Wijaya :
Pengaruh Profitabilitas, *Financial Leverage* dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Propensity Income Smoothing* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Win Konadi & Dandan Irawan :
Tinjauan Konseptual Kewirausahaan dalam Bisnis Pembentukan Wirausaha Baru untuk Mengatasi Pengangguran

UNIVERSITAS ALMUSLIM
Bireuen - Provinsi Aceh

Volume III No. 5
Maret 2012

ISSN : 2086-6011

Volume III, No.5 Maret 2011

PELINDUNG
Rektor Universitas Almuslim Bireuen
(Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si.)

PENYUNTING AHLI
Prof. DR. Rusdarti, M.Si.
(Universitas Negeri Semarang)
Prof. Erman Anom, P.hD.
(Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta)
Dr. Amri ZA, SE., M.Si.
(Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
Dr. Syahirman Yusi, M.Si.
(Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang)
Dr. Manat Rahim, M.Si.
(Universitas Haluoleo Kendari)

PEMIMPIN UMUM
Dr. Ishak Hasan, M.Si.

PIMPINAN REDAKSI
Sonny M. Ikhsan M., SE.,M.Si.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Drs. Win Konadi Manan, M.Si.

DEWAN REDAKSI
DR. Ishak Hasan, SE., M.Si.
Drs. Marwan Hamid, M.Pd.
Muhammad. Iqbal, M.Ag.
Marzalena, SE., M.Si.
Fakriah, SE, Ak., M.Si.

REDAKSI PELAKSANA
Asrida, SE.,Ak., M.Si.
Haryani, SE.
Azli Fakhrizal, SE, M.M
Agus Irwanto, SE.
Sabri Yusuf, SE, M.Si
Hendrianto, SE, M.M
Chairul Bariah, SE, M.M

PIMPINAN USAHA
Mukhlis, SE, M.Si

SIRKULASI
Nanda Afrina, A.Md.

SETTING & PERCETAKAN
LPPM UNIMUS PRESS

SEKRETARIAT
FE - UNIMUS ; Kampus Timur
Jl. Almuslim Matangglumpangdua
Kab. Bireuen Aceh Tlp.(0644) 442166
e-mail : fe.unimus@yahoo.co.id
Blog : http:\\ekonomikaunimus.wordpress.com
Website : www.umuslim.ac.id

ekonomika

JURNAL EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ekonomika – Jurnal Ekonomi dan Pembangunan

Jurnal ekonomika, menyebarkan pemikiran dalam bidang ekonomi dan pembangunan dari hasil penelitian, dan tulisan ilmiah, gagasan orisinil kritis serta aktual. *Jurnal ekonomika, Terbit setahun dua kali, yakni bulan Maret dan September.* Redaksi mengundang para dosen, dan praktisi untuk mengisi jurnal ini.

Penyajian dapat berupa tulisan ilmiah, hasil penelitian, gagasan orisinil yang segar, objektif dan ber tanggung jawab. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksudnya. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dengan dilengkapi abstrak, masing-masing tidak lebih dari 2000 kata, huruf arial 12 diketik pada kertas kuarto, jarak dua spasi disusun dengan urutan : judul, nama penulis, abstrak, isi tulisan, daftar pustaka dan dilengkapi riwayat hidup singkat *penulis.*

Jika tulisan merupakan hasil penelitian, disusun dengan urutan : pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, pendekatan atau bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Panjang naskah tidak lebih dari 6000 kata. Naskah dalam bentuk hasil *printout* dan CD, dikirim ke sekretariat Redaksi Jurnal ekonomika, atau dapat di email ke :

fe.unimus@yahoo.co.id.

Informasi kebih lanjut dapat dibaca pada:
http:\\ekonomikaunimus.wordpress.com.

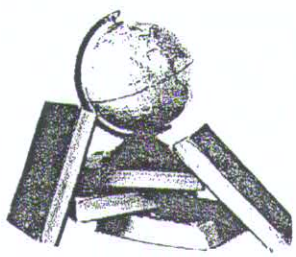

DITERBITKAN OLEH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN - ACEH

Redaksi

Volume III, No.5 Maret 2012

Pembaca Yth.,

Volume III No 5 **Jurnal Ekonomika** kali ini, terbit di bulan Maret 2012. Dalam terbitan kali ini, memuat 7 tulisan yang berupa hasil penelitian, ide dan gagasan serta pemikiran dari dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim, dan dosen dari beberapa perguruan tinggi lainnya.

Dalam tulisan **M. Syahirman Yusi**, tentang Revitalisasi Kebijakan: Upaya Peningkatan Kinerja Koperasi Indonesia Di Era Pasar Bebas, menyatakan dalam upaya pengembangan koperasi ke depan, bukan saja peranan pemerintah yang menentukan perkembangannya, tetapi juga masyarakat itu sendiri yang ikut menentukan berkembang atau tidaknya suatu koperasi, baik sebagai anggota koperasi maupun sebagai anggota masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi tersebut.

Sementara Itu, **Amiruddin Idris**, dari hasil penelitiannya tentang "Pengaruh Motivasi Kerja dan Jiwa Kewirausahaan terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur SKPD dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh", menyimpulkan bahwa motivasi kerja aparat SKPD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur SKPD dengan besaran pengaruhnya sebesar 21,42%. Sedangkan dari jiwa kewirausahaan pada diri aparat SKPD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur dengan besaran pengaruhnya sebesar 8,85%. Pengaruh Pelayanan Aparatur terhadap Kualitas pelayanan pada Publik di Provinsi Aceh memberikan pengaruh yang sangat signifikan dengan besaran pengaruhnya sebesar 83.36 persen.

Beberapa tulisan lain, secara lengkap sangat menarik untuk dibaca dan disimak sebagai bahan referensi dan sekaligus informasi dalam kondisi sekarang ini. Semoga tulisan-tulisan yang disajikan dalam terbitan kali ini memberikan manfaat lebih untuk kita semua.

Wassalam.
Redaksi.

DAFTAR ISI

ekonomika
ISSN: 2086-6011

Syahirman Yusi :
Revitalisasi Kebijakan: Upaya Peningkatan Kinerja Koperasi Indonesia di Era Pasar Bebas 1

Amiruddin Idris :
Pengaruh Motivasi Kerja dan Jiwa Kewirausahaan terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur SKPD dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh 9

Sonny M. Ikhsan M. :
Pengaruh Keamanan, Kesadaran Masyarakat, Pungutan Liar, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam terhadap PAD Bireuen 24

Umiyati Idris, Sriati, M.Yamin, dan Taufik Marwa :
Konsep Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 33

M. Yusuf A. Samad :
Pengaruh Imbalan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Sekretariat DPR Kota Lhokseumawe 42

Ismed Wijaya :
Pengaruh Profitabilitas, *Financial Leverage* dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Propensity Income Smoothing* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 52

Win Konadi & Dandan Irawan :
Tinjauan Konseptual Kewirausahaan dalam Bisnis Pembentukan Wirausaha Baru untuk Mengatasi Pengangguran 62

Jurnal ekonomika Universitas Almuslim Bireuen - Aceh
Vol.III No.5 • Maret 2012

ISSN :
2086-6011

KONSEP PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

Umiyati Idris, Sriati, M.Yamin, dan Taufik Marwa
Program Doktor Ilmu Pertanian, BKU Agribisnis,
Pascasarjana Universitas Sriwijaya
email: umidris@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to elobrates theory and concept that has been constructive widely with describing paradigm of theory and framework in research. The study was about: (1) agricultural development by government is developing farming small scale society,. (2) government have to construct bureaucratic system with strong commitment to empower the poor farmer to implement of PUAP (Development of Rural Business Agriculture) policy, in order to develop rural economy through BLM investment. (3) the development of poor farmer by envelopment of their participation in development sector in order they have high motivation, good working collaboration synergy to search collaborative goal, develop entrepreneurship, so that production and distribution can be effective and efficient.

Keyword : empowerment, bureaucracy system, and poor farmers.

1. Pendahuluan

Filosofi dasar pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Indonesia menghendaki agar di dalam masyarakat tidak terjadi kesenjangan sosial yang tajam baik antar wilayah, antar golongan, maupun antar sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perhatian terhadap kelompok yang kurang berdaya merupakan skala prioritas yang menjadi kewajiban semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan semua masyarakat Indonesia.

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia bermula dari adanya kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses berbagai kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi jauh lebih tinggi.

Kesenjangan sosial ekonomi ini dapat dilihat dari distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan Angka Gini Ratio. Pada periode 2007-2008 angka gini ratio sedikit mengalami perbaikan baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Di perkotaan menurun dari 0,374 menjadi 0,367 dan di perdesaan menurun dari 0,302 menjadi 0,300.(BPS, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan, 2008, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi).

Indikator lain untuk melihat kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk berdasarkan kriteria Bank Dunia

ISSN : 2086-6011

yang membagi kelompok penduduk menjadi 3 bagian yaitu 40% kelompok penduduk terbawah, 40% kelompok penduduk menengah, dan 20% kelompok penduduk teratas. Pada 40% kelompok penduduk terendah terjadi penurunan persentase dari 19,08 menjadi 18,55 yang diikuti oleh meningkatnya persentase pada 20% kelompok penduduk teratas dari 43,80 menjadi 44,45 di daerah perkotaan. Untuk di perdesaan terjadi peningkatan persentase pada 40% kelompok penduduk terendah dari 22,00 menjadi 22,06 yang diikuti oleh menurunnya persentase pada 20% kelompok penduduk teratas dari 40,05 menjadi 39,36. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi pelebaran kesenjangan di perkotaan dan menyempitan kesenjangan di perdesaan (BPS, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2008).

Kesenjangan yang membaik di daerah perdesaan ini karena telah dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai program pembangunan diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri). Sehingga penduduk miskin semakin berkurang walaupun sedikit. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah dan Persentasenya Penduduk Miskin Menurut Daerah di Indonesia
Maret 2007-2008

Daerah/ Tahun	Penduduk Miskin (juta)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)
Perkotaan:			
Maret 2007	13,56	12,52	187.942
Maret 2008	12,77	11,65	204.896
Perdesaan:			
Maret 2007	23,61	20,37	146.837
Maret 2008	22,17	18,93	161.831
Kota + Desa:			
Maret 2007	37,17	16,58	166.697
Maret 2008	34,96	15,42	182.636

Sumber: BPS (Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008) diolah

Tabel ini juga memperlihatkan bahwa penduduk miskin banyak terdapat di daerah perdesaan, begitu pula persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dari penduduk miskin di perkotaan walaupun pada tahun berikutnya memperlihatkan ada penurunan baik jumlah maupun persentasenya. Garis kemiskinan di perdesaan lebih rendah dari perkotaan, dan juga ada peningkatan pada tahun berikutnya baik perkotaan maupun perdesaan.

Demikian juga jumlah dan persentase penduduk miskin yang ada di tingkat propinsi terjadi penurunan dari tahun 2008 hingga tahun 2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2008	1.254,30	17,73
2009	1.167,87	16,28
2010	1.125,73	15,47

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS No.34/07/16/Th.XII, 1 Juli 2010

Petani sebagai subyek terbesar dalam rumah tangga miskin yang berkecimpung pada sumber penghasilan utama pertanian dan berada di daerah perdesaan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Penghasilan Utama Rumah Tangga dan Daerah di Indonesia tahun 2008

Karakteristik Rumah Tangga/Daerah	Tidak Bekerja	Pertanian	Industri	Lainnya	%
Perkotaan	14,71	30,02	10,55	44,72	100
Perdesaan	8,67	68,99	5,09	17,26	100
Kota + Desa	10,62	56,35	6,86	26,16	100

Sumber: Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2008, BPS

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sumber penghasilan utama dari sektor pertanian, dimana 30,02 persen di perkotaan dan 68,99 persen di perdesaan. Secara umum mengidentifikasikan bahwa sebagian besar orang miskin bekerja di sektor pertaniaan dan berdomisili di perdesaan. Oleh karena itu penduduk miskin di daerah perdesaan identik dengan petani miskin.

2. Harapan Petani Dengan Program Puap

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

ISSN : 2086-6011

Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok pemberdayaan masyarakat. Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional, di tingkat Propinsi membentuk Tim Pembina, dan di tingkat Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis hingga pada tingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

Tujuan PUAP untuk: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis; dan (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Permentan No. 29 th 2010).

Sasaran PUAP yaitu: (1) berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin yang terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa.; (2) berkembangnya 10.000 Gapoktan/ Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; (3) meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan (4) berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman (Permentan No. 29 th 2010).

Menjalankan program PUAP ini sangat membutuhkan penyuluh-penyuluh yang berkualitas dalam rangka membina para petani yang tergabung dalam Gapoktan agar dapat memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga dapat meningkatkan kapasitas produksi petani, dengan sendirinya petani akan dapat memperoleh kesejahteraan.

Oleh karena itu Kementerian Pertanian melakukan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dengan menata kembali Penyuluhan Pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp dan kesatuan arah kebijakan, sehingga keluar UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian

Adapun permasalahan yang dihadapi selama ini adalah rendahnya kualitas dan kuantitas penyuluh baik Penyuluh Pemerintah, Penyuluh Swasta, dan Penyuluh Swadaya. Karena itu untuk memperkuat tenaga penyuluhan pemerintah mengangkat 6000 orang penyuluh honorer tahun 2007 dan 10.000 orang tahun 2008 dan 2009 (Lampiran Permentan No. 29/Permentan/OT 140/3/2010).

Situasi dan kondisi seperti ini, maka para petani mengharapkan upaya pemberdayaan melalui program PUAP ini dapat membantu pengembangan ekonomi petani di perdesaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan sekaligus dapat mensejahterakan petani.

3. Kajian Konsep Pemberdayaan

A. Teori yang Digunakan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dibakukan berdasarkan ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri. Proses pemberdayaan mengandung dua kedenderungan. *Pertama* : kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*: kecenderungan sekunder, proses ini menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Oakley & Marsden, 1984).

Kemiskinan bukan merupakan suatu kondisi alamiah semata, melainkan suatu proses pengingkaran pemberdayaan secara sosial, ekonomi dan politis. Ketidakberdyaan bukan menunjuk pada tidak adanya kekuatan sama sekali. Dalam realitas mereka tampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan yang ternyata mampu untuk bertahan dan kadang-kadang dapat mentrasformasikan kondisi hidupnya. Jadi kekuatanya perlu dibina dan dikembangkan.

Menurut Friedmann (1992), dalam rangka pembinaan rumah tangga menempatkan tiga macam kekuatan yaitu kekuatan sosial, politik dan psikologis. *Pertama* : kekuatan

ISSN : 2086-6011

sosial, menyangkut akses terhadap dasar-dasar produktif tertentu suatu rumah tangga misalkan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi sosial *Kedua*: kekuatan politis, menyangkut akses kepada pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan. Kekuatan ini tidak terbatas hanya memberikan suara tetapi juga kekuatan menjadi vokal dan secara bersama-sama didengungkan melalui asosiasi politik misalkan kaum tani/ buruh dan lain-lain. *Ketiga* : kekuatan psikologis, menyangkut pada potensi pribadi yang meningkat menjadi percaya diri, rasa percaya diri akan memberikan pengaruh positif dalam perjuangan meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

Penyuluh pertanian memegang peranan penting dalam pemberdayaan. Kemampuan penyuluh harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kemampuan komunikasi, kemampuan meningkatkan partisipasi, maupun kemampuan usaha agribisnis dari usahatani sarana produksi pertanian, produksi produk pertanian termasuk agroindustri, dan pemasaran produk pertanian.

Manajemen agribisnis harus dipahami melalui pendekatan holistik tertama pada penyuluhan sistem agribisnis. Dari hasil penelitian Suparta N (2005) bahwa :

1. Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani selama ini, karena terlalu berorientasi pada produk dan produktivitas, kurang berorientasi pada kebutuhan pasar dan hubungan sistem agribisnis, sehingga perolehan nilai tambah rendah. Sinergi antara perusahaan usahatani dengan perusahaan agribisnis lainnya kurang solid. Akibatnya permintaan produk pertanian menjadi tidak jelas dan harganya cenderung kurang menguntungkan petani.
2. Kegiatan penyuluhan ditujukan selain pada para pelaku agribisnis juga pada lembaga tertentu yang berada pada subsistem jasa penunjang, sehingga kebersamaan dan saling ketergantungan semua perusahaan agribisnis akan menghasilkan visi, misi, etika bisnis, tujuan dan sasaran serta rencana kerja yang sama.
3. Untuk meningkatkan perilaku agribisnis diperlukan pendekatan penyuluhan sistem agribisnis yang materinya mencakup keseluruhan aspek teknis produksi, aspek manajemen agribisnis dan aspek manajemen hubungan sistem agribisnis dengan wawasan industri, terutama etika kesisteman, kewirausahaan, keperibadian sebagai pengusaha agribisnis.
4. Penyuluhan sistem agribisnis akan menjadikan penyuluh yang professional, dan semakin efektif apabila menghayati materi penyuluhan sistem agribisnis, serta berkemampuan tinggi apabila menerapkan keanekaragaman metode penyuluhan dengan media komunikasi secara tepat dan bijak.

Penyuluhan sistem agribisnis harus dikemas secara nasional dalam suatu paket tertentu dengan materi mencakup keseluruhan aspek teknis produksi, aspek manajemen agribisnis, dan hubungan kesisteman dalam agribisnis. Materi penyuluhan ini diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah dengan tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan materi penyuluhan tersebut sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar, dan semua ini tergabung dalam kebijakan pemerintah program PUAP.

Pengembangan usaha agribisnis di perdesaan adalah merupakan kebijakan pemerintah yang telah diperkuat dengan Undang-Undang Penyuluhan No. 16 tahun 2006, inipun merupakan kebijakan pemerintah, maka George C. Edward III telah memberikan beberapa variabel yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yaitu (1) komunikasi, harus adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah, serta ketepatan dan keakuratan informasi, karena apabila pesan yang disampaikan tidak jelas, maka akan menimbulkan interpretasi yang salah bagi pelaksana; (2) sumber-Sumber daya, sumber daya ini mencakup keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, sumber dana, informasi yang relevan dan cukup, kewenangan dalam menjamin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki, dan fasilitas; (3) sikap aparatur pelaksana *(disposition)*, disposisi dalam kebijakan ini menyangkut kecenderungan, keinginan atau kesepakatan pelaksana *(implementators)* untuk melaksanakan kebijakan; dan (4) struktur birokrasi, struktur birokrasi ini meliputi *Standard Operating Prosedure* yang akan memudahkan

ISSN : 2086-6011

dan menyeragamkan tindakan pelaksana kebijakan.

Program PUAP merupakan kebijakan pemerintah secara nasional. Koordinasi pusat dan daerah harus lancar mulai dari komunikasi dengan informasi yang konsisten dan akurat, sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas, sumber dan yang cukup, fasilitas yang lengkap, sikap aparatur pelaksana mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dengan baik, hingga kepada standar prosedur operasional yang jelas.

Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan merupakan landasan penting dalam pemberdayaan, karena keberhasilan dalam pemberdayaan adalah keberhasilan bersama atau negara. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Noertheraft, 1990 bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah harus juga mempunyai komitmen yaitu iktikad yang kuat dalam melakukan sesuatu yang mempunyai suatu keyakinan, kesediaan, dan keinginan yang kuat. Komitmen ini harus dilandasi rasa memiliki, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan akhirnya akan menimbulkan rasa kebanggaan dalam diri pelaksana.

Dalam melakukan pemberdayaan tidak akan selalu efektif kalau hanya di pandang dari sosial saja (*social oriented*) tetapi harus dipandang dari sifat bisnis (*business oriented)*, maka teori pertumbuhan akan membantu untuk mendapatkan keseimbangan dalam pemberdayaan. Pada dasarnya kinerja pihak pemberdaya yang dilaksanakan oleh penyuluh dalam memberdayakan pihak yang diberdayakan (petani miskin) adalah membantu meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan kapasitas produksi Selama investasi netto tetap berlangsung, maka *real income* dan *output* akan tetap membesar.

Bila ingin mempertahankan keseimbangan pendapatan, maka laju *real income* dan *output* harus sama pada saat kapasitas produksi meningkat sehingga tidak terjadi *idle capacity*. Apabila terjadi *idle capacity* maka para pengusaha akan mengurangi investasinya yang tentu saja berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan menurunkan kegiatan berikutnya sehingga akan menggeser perekonomian keluar jalur keseimbangan pertumbuhan mantap (Teori Harrod-Domar).

Teori pertumbuhan dari Harrod-Domar ini diharapakan dapat membantu upaya pemberdayaan petani. Program PUAP adalah pemberian dana bergulir sebagai investasi pengembangan agribisnis di perdesaan. Oleh karenanya pemanfaatan dana ini diharapakan dapat efektif dan efisien, sehingga dapat mempertahankan keseimbangan pendapatan yang mengikuti kapasitas produksi yang ada supaya tidak terjadi *idle capacity*.

Perdesaan mempunyai kapasitas produksi yang tinggi di bidang usahatani, selain tanah yang subur, juga sumber daya manusia yang banyak dengan keterampilan usahatani yang sudah turun temurun. Namun karena akses modal sulit diperoleh dan keterampilan manajerial kurang, maka perdesaan sulit untuk berkembang. Oleh karenanya dengan pemanfaatan dana bergulir dari program PUAP merupakan modal awal yang disertai dengan bimbingan dari penyuluh pertanian akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tani di perdesaan.

Beberapa variabel yang dikaitkan di dalam penelitian ini yaitu baik berupa variabel kinerja penyuluh, variabel faktor internal dan faktor eksternal yang merupakan cerminan dari kinerja sistem birokrasi, maupun variabel pemberdayaan dan variabel kesejahteraan petani. Semua ini memerlukan teori tentang kinerja, teori sistem birokrasi, teori budaya organisasi, teori partisipasi, dan teori produksi dan distribusi.

Menurut Kuper (dalam Terence R., 1987) bahwa konsep kinerja beranjak dari konsep produktivitas kerja, dan produktivitas kerja adalah kombinasi dari efektivitas dan efisiensi. Kinerja menurut Werther dan Davis (1996) adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau penampilan kerja dari seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Teori tentang birokrasi. Sistem Birokrasi adalah pertautan anrata beberapa unsur dalam organisasi birokrasi yaitu struktur organisasi, visi misi, personel/pejabat, fasilitas pendukung, dan kepemimpinan yang saling berhubungan satu sama lain untuk tujuan tertentu (Rohdewobld,1995:62). Teori organisasi merupakan cara pikir tentang organisasi yang berdasarkan pola dan

ISSN : 2086-6011

peraturan dalam sistem organisasi dan perilaku manusianya.

Demikian pula budaya organisasi menurut Sechien (Sobirin, 2007) bahwa pola asumsi dasar yang di *share* oleh sekelompok orang setelah sebelumnya mereka mempelajari dan meyakini pola tersebut sebagai cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sehingga pola ini perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru tentang cara yang benar dalam berpersepsi, berpikir, berperilaku dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah organisasi.

Partisipasi dapat diukur dari kegiatan-kegiatan dalam proses pemberdayaan, karena proses pemberdayaan tanpa dimulai dari meningkatkan partisipasi petani adalah suatu hal yang tidak mungkin proses pemberdayaan ini akan berjalan dengan baik. Tujuan utama dari PRA (Partisipation Rural Apraisal) adalah untuk menjaring rencana/program pembangunan perdesaan yang memenuhi persyaratan. Syaratnya adalah diterima oleh masyarakat setempat, secara ekonomi menguntungkan, dan berdampak positif bagi lingkungan.

Partisipasi petani dalam pengembangan agribisnis di perdesaan akan memicu peningkatan produktivitas dengan kreativitas-kreativitasnya. Pada saat partisipasi petani tinggi maka pada saat ini juga pemberdayaan yang dilakukan oleh penyuluh akan menjadi efektif.

Bagaimana meningkatkan kewirausahaan (percaya diri, ber-orientasi pada tugas dan hasil, mampu merencanakan, berani mengambil resiko, kepemimpinan, dan berorientasi pada masa depan), bagaimana menambah guna pada barang dan jasa dengan mutu hasil produksi yang berkualitas. Serta bagaimana mendistribusikan hasil produksi ke tangan konsumen melalui lembaga pemasaran yang dapat dikelola bersama untuk keuntungan bersama sehingga dapat meningkatkan daya tawar terhadap usaha-usaha besar yang menjadi saingan.

Begitu juga bagaimana melakukan kemitraan antara usahatani dengan usaha menengah dan usaha besar yang saling menguntungkan.

Secara ringkas rangkuman teori ini dapat dilihat dari gambar-1, berikut :

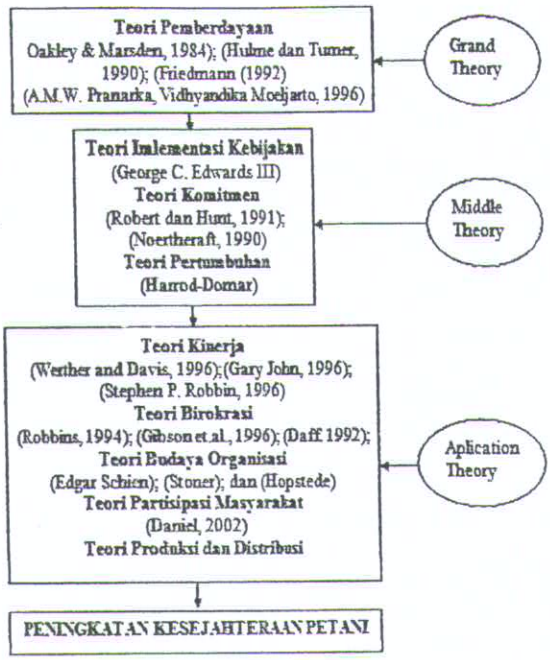

Gambar 1: Pertalian Konsep yang Dikembangkan dari Teori Pemberdayaan.

B. Kerangka Pikir

Dari pertalian konsep yang dikembangkan dari teori pemberdayaan, maka dapat dibuat suatu kerangka berpikir yang sesuai dengan variabel-variabel yang muncul dari latar belakang dan perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

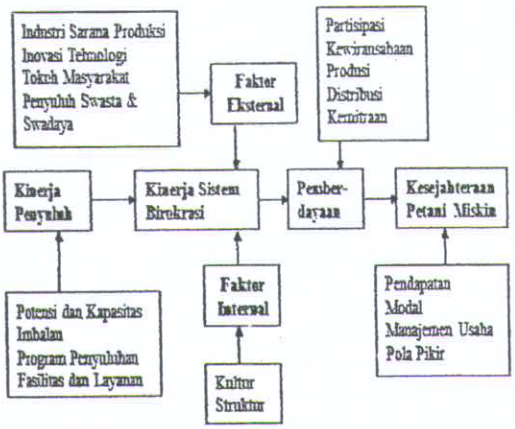

Gambar 2 : Model Kerangka Pikir Pemberdayaan Petani Miskin

Keterangan :

Peran dan fungsi penyuluh merupakan kinerja penyuluh dan juga mencerminkan

ISSN : 2086-6011

kinerja sistem birokrasi. Meningkatkan kinerja tentu saja membutuhkan komitmen yang kuat baik penyuluh maupun sistem birokrasi. Komitmen ini tentu saja akan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kultur dan struktur dalam organisasi birokrasi. Kultur dapat dicerminkan oleh kepatuhan, dukungan, saling menghormati, mementingkan kerjasama dan juga menciptakan nilai-nilai luhur dalam organisasi. Sedangkan struktur dapat dicerminkan oleh wewenang, tanggung jawab, pembagian tugas, pengawasan, objektif pada keputusan, dan pengarsipan semua data-data yang teratur dan lengkap.

Selain faktor internal, juga tak kalah pentingnya faktor eksternal yang dapat berpengaruh dalam upaya pemberdayaan petani miskin, seperti tersedianya industri sarana produksi, adanya inovasi tehnologi agar bekerja lebih efisien dan efektif, dan juga tokoh masyarakat sebagai pemberi semangat dan dukungan kepada pembangunan pertanian di wilayah masing-masing.

UU Nomor 16 Tahun 2006 tersebut merupakan titik awal dalam pemberdayaan para petani melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia para penyuluh pertanian pemerintah dalam upaya mengefektif dan mengefisienkan kinerja sistem birokrasi. Kinerja penyuluh pemerintah mencerminkan kinerja sistem birokrasi. Dalam implementasinya masih dijumpai belum efektif dan efisiennya kinerja penyuluh pemerintah, sehingga hasil yang diharapkan relatif belum memuaskan (Sulaiman, dkk., 2005).

Kinerja sistem birokrasi dapat dilihat dari bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakannya pada program PUAP dan bagaimana komitmen yang mereka miliki dalam memberdayakan petani, semua ini akan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi perdesaan. Dalam pemberdayaan, peran pemerintah harus mendukung semua kegiatan dalam rangka mencapai kesejahteraan petani tersebut. Kehidupan petani dalam kehidupan nyata tidak lepas dari peran pemerintah, dan bahkan dalam menetapkan ataupun melaksanakan kebijakan-kebijakannya, birokrasi pemerintah bersama-sama politisi dan pelaku bisnis telah menempatkan petani sebagai sub-ordinatnya. Karena itu kemakmuran dan kesejahteraan petani sangat tergantung kepada seberapa jauh kebijakan pemerintah berpihak kepada petani atau justru menempatkan petani sebagai martil pembangunan (Mardikanto, 2007).

Pemberdayaan petani merupakan upaya mempersiapkan masyarakat tani seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan petani adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan petani adalah memampukan dan memandirikan masyarakat perdesaan baik dalam kemampuan usaha, partisipasi dalam pembangunan, peningkatan produksi, maupun pendistribusian hasil (Kartasasmita, 1996).

Pemberdayaan petani yang lebih diutamakan adalah meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan agar petani mempunyai semangat kerja, dan dapat membangun kerjasama yang baik agar dapat bersinergi, meningkatkan kewirausahaan, agar produksi dan distribusi dapat efisien dan efektif yang berarti akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam mengelola usaha mereka baik berupa usaha tani (padi, palawija dan sayuran), ternak, dan bakulan. Upaya pemberdayaan ini tentu akan diperlukan teori pendukung yaitu teori kinerja, teori birokrasi, teori budaya organisasi, teori partisipasi masyarakat, dan teori produksi dan distribusi hasil-hasil pertanian. Teori inilah yang merupakan *aplication theory*,

Keterbatasan modal petani yang disebabkan oleh tidak adanya akses langsung mereka terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) maupun nonbank. Dengan keterbatasan modal yang dipunyai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas menjadi terhambat. Modal memainkan peranan yang sangat dominan dalam pengembangan usaha (Longenecker, *et.al.*, 1998).

Keterbatasan pada akses pasar selain disebabkan oleh jumlah hasil yang relatif

ISSN : 2086-6011

sedikit juga mutu hasil pun kadang tidak memenuhi permintaan pasar, jangan kan pasar ekspor, pasar dalam negeri sendiri pun kadang sulit untuk ditembus. Mutu barang yang seadanya dengan jumlah barang yang dihasilkan terbatas. mengakibatkan peluang pasar yang tadinya dapat mereka raih menjadi terlewatkan. Di samping itu faktor teknologi yang digunakan juga masih bersifat konvensional mengakibatkan barang mereka kalah dalam bersaing dalam segala segi bila masuk pasar-pasar modern.

Kenyataan lain memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian manajemen yang dipunyai. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya. Akibatnya adalah petani kurang mampu mengelola organisasi tani dengan baik, organisasi tani yang tadinya dapat memberikan manfaat yang besar jika dikelola dengan manajemen yang baik menjadi sia-sia karena ketidakmampuan dalam mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang ideal.

Pendidikan merupakan faktor penting untuk mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan serta motivasi untuk maju, maka merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani miskin ini. Pada kenyataannya tanpa perbaikan kualitas faktor manusia tidak mungkin ada kemajuan, sehubungan dengan itu pendidikan menjadi sesuatu yang perlu (Jhingan, 1994).

Pentingnya pemberdayaan melalui program PUAP ini, disebabkan secara mikro-usaha, perikehidupan agribisnis nusantara masih dikendalai oleh adanya beberapa faktor akar permasalahan dasar diantaranya yaitu: (1) di tingkat organisasi petani, umumnya tidak ada kemampuan internal membuat perencanaan usaha; (2) di tingkat usaha tani juga, umumnya tidak ada kondisi pendorong menjalankan sistem manajemen profesional; (3) di lingkungan usaha, tak terdapat kepastian hukum menyertai ketajaman dan kehandalan profesional. Oleh karena itu agar dapat tetap eksis dalam menjalankan usahanya, organisasi agribisnis harus kokoh, dan untuk membuatnya kokoh perlu upaya perkuatan di dalam dan juga upaya perkuatan dari luar sebagai penyangga (Sjarkowi dan Sufri, 2004).

Penyuluh harus dapat menjadikan lembaga GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi perdesaan, sehingga dapat menanggulangi masalah modal, produksi, distribusi, dan konsumsi, lembaga tersebut adalah Koperasi. Pembentukan koperasi memerlukan komitmen yang kuat untuk bekerjasama pada kepentingan bersama "berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing", pengelola koperasi harus mampu menyeimbangkan antara *social oriented dan business oriented*, agar dapat meningkatkan daya tawar petani terhadap usaha-usaha besar lainnya.

Koperasi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan dengan akselerasi ke seluruh usaha agribisnis di perdesaan dan perlipatan yang semakin tinggi, dengan demikian upaya meningkatkan kemitraan dengan usaha besar dapat dilakukan tanpa adanya ketidakadilan sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra *(win-win solution)*

4. Penutup

Tulisan ini adalah merupakan kajian konsep pemberdayaan petani miskin melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Konsep pemberdayaan ini memadukan konsep ekonomi dan konsep administrasi publik agar dalam upaya pemberdayaan tidak ditinjau hanya dari sisi tertentu saja tetapi ditinjau secara holistik. Teori Pemberdayaan adalah merupakan Grand Theory yang didukung oleh Middle Theory yaitu teori Implentasi Kebijakan, Teori komitmen dan Teori Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian untuk mengaplikasikan teori pemberdayaan ini di dukung oleh teori Kinerja, Teori Birokrasi, Teori Budaya Organisasi, Teori Produksi, Teori Distribusi dan Teori Kemitraan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, No. 14/03/16/Th.XIIO,01 Maret 2010.

Badan Pusat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*.

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik, Sumatera Selatan*, No.07/02/16/ Th.XII, 1 Februari 2010.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Rumah Tangga Sasaran, *Hasil Pendataan Program*

ISSN : 2086-6011

Perlindungan Sosial 2008, Menurut Kategori Kemiskinan di Sumatera Selatan.

Carmeli Abraham and Anat Freud, 2004. Work Commitment, Job Satisfactionand Job Performance: An Empirical Investigation, *International Journal of Organization Theory and Behavior*, 7(3):289.

Daniel, Moehar, Darmawati, dan Nieldalina, 2005. *PRA (Participatory Rural Appraisal): Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*, Bumi Aksara, Jakarta.

David Clutterbuck, 2003. *The Power of Enfowerment, Reliase The Hidden Talent of Your Employees*, Alih Bahasa Bern Hidayat, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Edward III, George C., 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC.

Gunawan, 1998. *Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara*, Tesis (tidak diterbitkan) PPS Unpad, Bandung.

Heckscher, Charles and Anne Donnellon, 1994. *The Post Bureaucratic Organization: New Perspective on Organizational Change*, Sage Publication, Thousand Oaks.

Jhingan, M. L, 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan D. Guritno, C.V. Rajawali, Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Bahan Kuliah PPS Studi Pembangunan, ITB, Bandung.

Masyhuri, 2006. *Konsep Industrialisasi Pertanian yang Berkeadilan dan Berkelanujtan*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional, Revitalisasi Kebijakan Menuju Industrialisasi Pertanian yang Berkeadilan dan Berkelanjutan oleh Guru Besar UGM ke 57 tanggal 8-9 Desember 2006.

Maryunani, 2006. Strategi Pengentasan Kemiskinan sebagai Implementasi Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Tahun 11, Nomor 1, April 2006, Universitas Negerti Malang, halaman 238.

Neale dan Noertheraft, 1990. *Organizational Behavior Developing Managerial Skill*, Harper and Row Publishing, New York.

Robbins, P. Stephen, 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, Aplikation*, Alih Bahasa Lukman Hakim, Rajawali, Pers, Jakarta.

Sjarkowi, Fachrurrozi dan Marwan Sufri, 2004. *Manajemen Agribisnis*, Baldad Grafiti Press, Palembang.

Sobirin, 2007. *Budaya Organisasi: Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, STIM-YKPN, Yogyakarta.

Sumodingrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sulaiman, Fawzia, I Wayan Rusastra dan Ahmad Subaidi, 2005. Keragaan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Volume 8 Nomor 3, Nopember 2005, halaman 348.

Suparta, Nyoman, 2005. *Penyuluhan Sistem Agribisnis Suatu Pendekatan Holistik*, PS Sosek dan Agribisnis, Universitas Udayana.

Riwayat Penulis:

Hj. Umiyati Idris, S.E., M.Si.
Lektor Kepala STISIPOL Candradimuka Palembang. Kelahiran Buluh Cawang (OKI) 26 Agustus 1956. Sarjana Ekonomi (FE Unsri), S2 bidang Ekonomi (PPS Unsri), Kandidat Doktor Agribisnis (PPS Unsri). Saat ini menjabat sebagai Pembantu Ketua I dan Dosen PPS pada STISIPOL Candradimuka.

Prof. Dr. Sriati, M.S.,
Dr. Ir. M. Yamin, M.Si. dan
Prof. Dr. H. Taufik Marwa, S.E., M.Si.
adalah Dosen PPS Unsri Palembang.